

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengisyaratkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa dan negara. Amanat Undang-undang ini mengisyaratkan agar pembelajaran mampu membangun suasana belajar yang menyenangkan serta menantang sehingga siswa secara langsung merasakan, mengalami, dan terlibat dalam proses pembelajaran yang lebih bermakna. Pembelajaran yang bermakna akan meningkatkan pencapaian tujuan belajar yang lebih maksimal. Menciptakan pembelajaran bermakna merupakan tantangan yang harus dicapai bagi seorang guru yang efektif. Karena guru yang efektif akan menguasai berbagai materi pelajaran dan keahlian atau keterampilan mengajar yang baik, serta didukung oleh berbagai metode penetapan tujuan, rancangan pengajaran dan manajemen kelas (Santrock, 2015: 7). Begitu juga pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dimana tujuan pembelajaran bukan hanya transformasi pengetahuan, akan tetapi ada penguatan sikap dan keterampilan. Untuk itu, seorang guru PPKn harus mampu melaksanakan pembelajaran yang dapat memperkuat ketiga kompetensi tersebut melalui berbagai model pembelajaran inovatif.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai mata pelajaran pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan menuntut agar siswa menjadi warga negara yang baik, cerdas dan dapat diandalkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk mencapai tujuan ini, maka proses pembelajaran yang dibangun harus mampu mengkonstruksi berbagai pengalaman belajar sehingga memberi kesadaran kepada siswa memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Untuk itu, guru harus mampu menyelenggarakan pembelajaran yang dapat mencapai tujuan tersebut. Paradigma pembelajaran harus menggeser dari yang sebelumnya *teacher center* (berpusat pada guru) menjadi *student center* (berpusat pada siswa). Hal ini dilakukan agar siswa dapat memahami dan menginternalisasikan berbagai konsep kewarganegaraan dalam kehidupan bangsa dan negara sehingga terbangun kesadaran menjadi warga negara yang cerdas, baik dan dapat diandalkan. Jika sudah terbangun kesadaran maka secara otomatis akan membangun motivasi untuk belajar. Biasanya motivasi ini akan lebih kuat bertahan lebih lama karena terjadi atas keinginan untuk mencapai prestasi serta memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk masa depan (Syah, 2017:134).

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah menjadi harapan yang dapat memberikan warna bagi lulusan pendidikan, khususnya dalam merespon segala tuntutan perubahan yang ada di Indonesia. Begitu juga bagi pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendidikan Kewarganegaraan pada tingkat SMP dewasa menurut Kosasih Djahiri (2000 : 2) *bersoko guru* pada aktivitas proses belajar dengan kadar yang tinggi serta bersifat multidimensional. Hal berdampak

pada skenario pembelajaran yang dirancang harus menggunakan pendekatan yang lebih bervariasi, guna mencapai kualitas pembelajaran yang lebih baik. Menurut Mulyasa (2003:101) bahwa proses pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruh siswa sekurang-kurangnya 75 % terlibat secara aktif, baik mental, fisik, maupun sosialnya. Sedangkan dari segi hasil, kualitas pembelajaran dikatakan baik apabila terjadi perubahan perilaku yang positif dari dalam diri siswa serta kemampuan menggali dan mengolah informasi, mengambil keputusan, menghubungkan variabel.

Selanjutnya, bagaimana kondisi pembelajaran PPKn selama ini. Berdasarkan hasil pengamatan di SMP Pahlawan Nasional Medan bahwa siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar-mengajar. Anak cenderung tidak begitu tertarik dengan pelajaran PPKn karena selama ini pelajaran PPKn dianggap sebagai pelajaran yang hanya mementingkan hafalan semata, kurang menekankan aspek penalaran sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai akhir siswa kelas VII pada dua tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1.1. Nilai Rata-rata UAS Mata Pelajaran PPKn Siswa Kelas VII SMP Pahlawan Nasional Medan

No	Tahun Ajaran	KKM	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1	2017/2018	70	40	80	60
2	2018/2019	70	50	85	65

Sesuai dengan data yang diperoleh, hasil belajar PPKn masih rendah/belum mencapai target kelulusan hasil belajar yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Proses pembelajaran yang berlangsung juga cenderung menggunakan

teacher centered. Pada pendekatan ini guru lebih banyak melakukan kegiatan belajar – mengajar dengan bentuk ceramah, dan siswa sebatas memahami sambil membuat catatan, bagi yang merasa memerlukannya. Guru menjadi pusat peran dalam pencapaian hasil pembelajaran dan seakan-akan menjadi satu-satunya sumber ilmu. Kondisi seperti ini sangat berpengaruh besar terhadap proses pembelajaran selanjutnya, siswa kurang mampu menerapkan ilmu yang diterima.

Kondisi ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Azis Wahab (Setiawan, 2017:8) mengungkapkan beberapa kelemahan yang ada pada pembelajaran PPKn yakni :

1. Terlalu menekankan pada aspek nilai dan moral belaka sehingga kurang menempatkan siswa sebagai obyek yang berkewajiban untuk menerima nilai-nilai moral tertentu
2. Kurang diarahkan pada pemahaman struktur, proses dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya
3. Bersifat dogmatis dan relatif
4. Berorientasi pada kepentingan rezim yang berkuasa

Pendapat lain dikemukakan oleh Setiawan (2017 : 8) bahwa ada beberapa alasan mengapa pembelajaran PPKn kurang efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran diantaranya adalah :

1. Terlalu dikuasai hafalan dan pemahaman mengenai fakta-fakta
2. Keterkaitan antara buku pelajaran dengan masalah-masalah sosial dalam masyarakat sangatlah rendah
3. Bahan pelajaran sangat membosankan dan tidak menarik karena proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam kedudukan *passive learning*

4. Bahan pelajaran kurang membantu siswa mempersiapkan diri ke Perguruan Tinggi, sehingga tidak dapat menarik manfaat untuk tugas pekerjaannya sebagai warga negara yang baik

Selain berbagai faktor di atas, banyak faktor lain yang menyebabkan hasil belajar belajar PPKn belum maksimal seperti faktor internal dan eksternal dari siswa. Faktor internal antara lain: motivasi belajar, intelegensi, kebiasaan dan rasa percaya diri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar siswa, seperti; guru sebagai pembina kegiatan belajar, strategi pembelajaran, sarana dan prasarana, kurikulum dan lingkungan (Syah, 2017). Beberapa hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa permasalahan utama pembelajaran PPKn adalah kurangnya pelibatan siswa dalam pembelajaran, pembelajaran masih bersifat indoktrinatif, serta minimnya penggunaan media dalam pembelajaran PPKn (Wahab dan Sapriya 2012). Berbagai permasalahan ini menyebabkan tidak sedikit siswa yang kurang menyukai pembelajaran PPKn. Rendahnya motivasi belajar ini harus menjadi tantangan bagi guru untuk menjadikan pembelajaran PPKn menjadi lebih menantang sehingga tujuan mata kuliah ini dapat tercapai. Selain itu, bukan menjadi alasan ketika dikatakan bahwa rendahnya minat belajar PPKn karena mata pelajaran ini tidak di Ujian Nasionalkan lagi. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Budimansyah (2009 : 32) yang mengemukakan : Saya tidak terlalu yakin penyebab kurang berminatnya siswa mempelajari PPKn karena tidak diujikan secara nasional. Pandangan tersebut setidak-tidaknya didasarkan pada 2 (dua) alasan, yaitu :

1. Pada saat mata pelajaran PPKn masih diujikan secara nasional (beberapa tahun silam), keluhan-keluhan semacam ini sudah terdengar. Artinya,

kurang minatnya siswa belajar PPKn bukan karena diujikan atau tidaknya secara nasional

2. Pada sejumlah sekolah yang telah mengadopsi inovasi pembelajaran, misalnya *Project Citizen*, minat siswa mempelajari PPKn tergolong tinggi. Mereka merasakan belajar yang sebenarnya, bukan hanya mempelajari PPKn akan tetapi mereka belajar ber-PPKn yakni belajar menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*).

Terlepas dari permasalahan di atas, permasalahan yang lebih penting dalam membangkitkan minat dan hasil belajar siswa adalah faktor guru PPKn itu sendiri. Guru sebagai fasilitator sangat memiliki peran dalam mengorganisasikan pembelajaran agar lebih bermakna. Akan tetapi dalam prakteknya dilapangan, guru PPKn terjebak dengan pola-pola pembelajaran konvensional yang didominasi oleh metode ceramah dan tanya jawab di kelas dengan buku sebagai sumber utamanya. Kondisi pembelajaran seperti ini sangatlah tidak sesuai dengan misi nasional PPKn sebagai mata pelajaran yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "*value-based education*". Hal ini mengakibatkan masih banyaknya guru PPKn yang terjebak pada pola-pola pembelajaran "*kognitif-based education*". Sehingga mengakibatkan mata pelajaran PPKn di anggap siswa sebagai mata pelajaran yang tidak menantang, sangat membosankan dan bersifat hafalan.

Untuk itu perlu dilakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap masalah-masalah mendasar, sehingga PPKn dapat menjadi pembelajaran yang kuat (*powerful learning area*). Pembelajaran yang kuat adalah pembelajaran yang ditandai dengan ciri-ciri bermakna (*meaningful*), terintegrasi (*integrated*), berbasis

nilai (*value based*), menantang (*challenging*) dan mengaktifkan (*activating*). Budimansyah dan Sapriya, (2012 : 3). Dengan demikian pembelajaran PPKn saat ini dan dimasa yang akan datang hendaknya :

1. Memiliki konsistensi antara tujuan idealnya dengan struktur program kurikulumnya, yang mengacu pada misi dan fungsi pembentukan kepribadian warga negara yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan
2. Seimbang antara pengembangan nilai moral dengan pemahaman struktur, proses dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya
3. Menerapkan pendekatan pedagogis dan metodologis yang tidak bernuansa dogmatis-indoktrinatif, melainkan menumbuhkembangkan budaya berfikir kritis, sistematis, kreatif dan inovatif
4. Terintegrasi dengan konteks disiplin keilmuan dan lingkungan sosial budayanya (Winataputra, 2002)

Dari berbagai tantangan yang dikemukakan diatas, perlu dicari strategi yang dapat melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang mengutamakan penguasaan kompetensi harus berpusat pada siswa (*focus on learners*), serta memberikan pengalaman belajar yang relevan dan kontekstual dalam kehidupan nyata dan mengembangkan mental yang kaya dan kuat dalam diri siswa. Disinilah guru dituntut untuk merancang kegiatan pembelajaran yang mampu mengembangkan berbagai kompetensi kewarganegaraan baik pengetahuan, sikap maupun keterampilan (*civic knowledge, civic disposition dan civic skill*). Strategi pembelajaran yang berpusat pada aktivitas dan penciptaan suasana yang menyenangkan sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi

kewarganegaraan. Strategi pembelajaran tersebut yakni dengan menggunakan model pembelajaran berbasis project (*Project Citizen*).

Penggunaan model pembelajaran berbasis project (*Project Citizen*) sangatlah pentingnya untuk membangun kemampuan berpikir kritis siswa atas perubahan di masa yang akan datang. Melalui kemampuan berpikir kritis peserta dapat merespon isu hak asasi manusia apakah itu benar atau tidak. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Norris dan Ennis, (1989) dalam Fisher (2008 : 4) bahwa berpikir kritis adalah “pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan”. Selain itu lebih lanjut Glaser mendefinisikan berpikir kritis :

1. Suatu sikap mau berpikir secara mendalam tentang masalah-masalah dan hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang
2. Pengetahuan tentang metode-metode pemeriksaan dan penalaran yang logis
3. Semacam suatu keterampilan untuk menerapkan metode-metode tersebut.

Berpikir kritis menuntut upaya keras untuk memeriksa setiap keyakinan atau pengetahuan asertif berdasarkan bukti pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan yang dilibatkannya, (Glaser, 1941: 5 dalam Fisher, 2008 : 3)

Penggunaan model pembelajaran berbasis project (*Project Citizen*) mampu mengembangkan kemampuan berbagai kompetensi kewarganegaraan khususnya dalam memahami berbagai isu-isu kewarganegaraan, termasuk hak asasi manusia (HAM). Melalui PPKn berbagai isu-isu kewarganegaraan dapat dikaji di dalam kelas sehingga meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Proses

pembelajaran ini akan menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif, peningkatan kompetensi, serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan, perasaan, serta kemauan untuk berbuat atau merespon suatu stimulus.

Untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas maka pemilihan model pembelajaran *Project Citizen* sangatlah tepat dalam pembelajaran PPKn. Karena kerangka dasar dibangunnya PPKn didasarkan atas paradigma :

1. PPKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab
2. PPKn secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi, ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela Negara
3. PPKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara (Winataputra dan Budimansyah, 2007)

Penggunaan model pembelajaran *Project Citizen* adalah satu instructional yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil (*civil society*). (Budimansyah, 2009). Model ini mampu memberikan kesempatan kepada para siswa untuk ambil bagian dalam pemerintahan dan masyarakat sipil sambil mempraktikkan berpikir kritis, dialog, debat, negosiasi, kerja sama, kesantunan, toleransi, membuat keputusan, dan aksi warga negara (*civic action*) yakni melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk kepentingan bersama (CCE, 1981, Budimansyah, 2009:2).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriani Yunizar (2010, dalam Budimansyah dan Sapriya, 2012 : 11) memperkenalkan *Project Citizen* pada siswa kelas V SDN Banjarsari 2 Bandung. Pada umumnya siswa menyenangi model tersebut karena mereka dapat belajar sambil bermain, menambah kreatifitas, dan menurut mereka model pembelajaran *Project Citizen* mengesankan karena belajar sambil praktik dan dapat memecahkan masalah secara bersama. Selanjutnya Studi implementasi *Project Citizen* pada jenjang SMP dilakukan oleh Pipih Sopiah, Ristina, dan Muhammad Mona Adha. Sopiah (2008) menemukan bahwa indikator-indikator budaya kewarganegaraan (*civic culture*) seperti keadaban, disiplin diri, peka terhadap masalah-masalah di masyarakat, sikap terbuka, kompromis, dan toleran tampak lebih menonjol pada sekolah rintisan *Project Citizen* (di Bandung) dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang bukan rintisan. Ristina (2009) juga menemukan bahwa kelas PPKn yang menerapkan *Project Citizen* di Pangkal Pinang mampu meningkatkan pemahaman tentang

konsep demokrasi, dan struktur pemerintahan, kewarganegaraan, dan *civil society* pada taksonomi tinggi (*generating* = memunculkan, merencanakan, memproduksi).

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mona Adha (2010) pada sebuah sekolah di Bandar Lampung dan melaporkan hasilnya bahwa *Project Citizen* memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan berpikir kritis, berinteraksi, dan berdiskusi dengan teman-teman sekelasnya, melakukan negosiasi, bekerja sama dan mengambil keputusan terbaik untuk kepentingan umum. Dari hasil penelitian terdahulu tampaklah bahwa model pembelajaran *Project Citizen* sangatlah sesuai bila dipraktikkan pada mata pelajaran PPKn untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan di kelas VII SMP Pahlawan Nasional Medan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapatlah diidentifikasi permasalahan penelitian ini yakni :

1. Rendahnya hasil belajar siswa kelas VII SMP Pahlawan Nasional Medan pada mata pelajaran PPKn belum mencapai standar KKM yang telah ditetapkan
2. Metode dan model pembelajaran yang digunakan cenderung bersifat konservatif, sehingga siswa cenderung tidak semangat dalam pembelajaran PPKn di kelas

3. Rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran PPKn mempengaruhi keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa seperti keterampilan personal dan sosial
4. Dibutuhkan model pembelajaran yang yang bervatif, kreatif dan inovatif yang dapat meningkatkan keterampilan personal dan sosial siswa pada mata pelajaran PPKn

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah menggunakan model pembelajaran *project citizen* dan Kompetensi Kewarganegaraan terhadap hasil belajar PPKn siswa kelas VII SMP Pahlawan Nasional Medan.

1.4. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah hasil belajar PPKn siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran *project citizen* lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional ?
2. Apakah hasil belajar PPKn siswa yang memiliki kompetensi kewarganegaraan tinggi yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran *project citizen* lebih tinggi dibandingkan dengan dengan model pembelajaran konvensional ?

3. Apakah terdapat Interaksi antara model pembelajaran *project citizen* dan kompetensi kewarganegaraan ?

1.5. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar PPKn siswa yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran *project citizen* dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional
2. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang memiliki kompetensi kewarganegaraan tinggi yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran *project citizen* lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional
3. Untuk mengetahui Interaksi antara model pembelajaran *project citizen* dan kompetensi kewarganegaraan terhadap hasil belajar PPKn siswa

1.6. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam upaya meningkatkan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PPKn di Kelas VII SMP Pahlawan Medan. Adapun secara terperinci adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Dapat menambah salah satu khasanah pengetahuan tentang model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, materi pelajaran, serta interaksi sosial siswa

2. Untuk bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran PPKn
 3. Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh model pembelajaran *project citizen* terhadap hasil belajar PPKn siswa
- b. Manfaat Praktis
1. Sumbangan pemikiran bagi guru-guru, pengelola, pengembangan, dan lembaga-lembaga pendidikan dalam menjawab permasalahan belajar siswa seperti keaktifan, kerjasama, dan meningkatkan hasil belajar siswa
 2. Sebagai umpan balik bagi guru dalam upaya meningkatkan hasil belajar PPKn siswa melalui model pembelajaran *project citizen*
 3. Bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama studi PPKn